

## **ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**

**Christian F.R Kadim<sup>1</sup>,**

<sup>1</sup>Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Manado  
e-mail:

### **Abstrak**

Tujuan Penelitian Ini Untuk mengetahui seberapa besar Pendapatan Asli Daerah Dalam Sektor Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai. Data responden berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 18 orang Responden yang ada di Sektor Pariwisata dan perempuan 17 data ini menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian ini didominasi oleh responden laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dari hasil analisis data yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kabupaten Kepulauan Morotai, Hal ini dapat memberikan Implikasi. bahwa dengan adanya Sektor Pariwisata, maka akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Kata kunci:** kontribusi sektor pariwisata, pendapatan asli daerah

### **Abstract**

*The aim of this research is to find out how much local original income is in the tourism sector of Morotai Island Regency. Respondent data based on gender, 18 respondents were men in the Tourism Sector and 17 women. This data shows that the sample in this study was dominated by male respondents. This research uses quantitative research methods. Based on the research results obtained from the results of the data analysis carried out, it can be concluded that there is a positive and significant influence between the Tourism Sector on Regional Original Income (PAD) in Morotai Islands Regency. This can have implications. that with the existence of the Tourism Sector, it will be possible to increase Regional Original Income (PAD).*

**Keywords:** Tourism sector contribution, regional original income

### **1. Pendahuluan**

Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penerimaan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia relatif masih kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah secara optimal. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dengan meningkatnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, peran keuangan daerah pun menjadi semakin penting, sebab daerah dituntut untuk lebih aktif dalam memobilisasi dananya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan penerimaan dan peningkatan PAD mereka, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Perencanaan ekonomi yang komprehensif menjadi hal penting agar daerah mampu memaksimalkan potensi ekonomi lokal yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan (supriyanto, 2022)

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan masalah PAD, tentu kita akan terfokus pada dua aspek utama yakni pajak dan retribusi meskipun masih ada aspek penerimaan resmi lain yang termasuk dalam PAD. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ada permasalahan yang dialami oleh daerah

dalam rangka peningkatan PAD yang disebabkan oleh berbagai faktor. Secara administrasi pengelolaan PAD belum dapat dikelola secara optimal karena para pelaksana atau aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya belum dapat memenuhi tertib administrasi. Selain itu hambatan dalam mengelola PAD adalah kurangnya kapasitas dan kapabilitas aparat, lemahnya sistem dan mekanisme pemungutan serta perlunya sistem dan prosedur administrasi.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Menurut Tambunan yang dikutip oleh Rudy Badrudin (2001), bahwa industri pariwisata yang menjadi sumber PAD adalah industri pariwisata milik masyarakat daerah (*Community Tourism Development* (CTD)). Dengan mengembangkan CTD pemerintah daerah dapat memperoleh peluang penerimaan pajak dan beragam retribusi resmi dari kegiatan industri pariwisata yang bersifat multisektoral, yang meliputi hotel, restoran, usaha wisata, usaha perjalanan wisata, *professional convention organizer*, pendidikan formal dan informal, pelatihan dan transportasi. Sektor pariwisata memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Dalam hal ini pariwisata menyumbang penerimaan kepada daerah dalam bentuk pajak dan retribusi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu Daerah wisata di kepulauan Maluku utara yang saat ini telah banyak dikembangkan. Objek Wisata yang terdapat di Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu potensi daerah yang mempunyai peranan strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian daerah dan nasional.

Penerimaan retribusi tempat wisata diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan meratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah.

Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut. Salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau Morotai adalah dengan meningkatkan pendapatan dari pungutan retribusi yang dalam hal ini adalah sektor pariwisata di kepulauan Morotai.

Adanya pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pulau Morotai tentunya mempengaruhi pertambahan realisasi PAD Kabupaten Pulau Morotai pada sektor pariwisata. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung setiap tahunnya akan memberikan keuntungan pada pertambahan devisa negara dan retribusi pariwisata.

Kabupaten Pulau Morotai baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Tidak dapat dipungkiri, peningkatan jumlah wisatawan tidak hanya memberikan penambahan penerimaan PAD tetapi juga memberikan peningkatan pada sektor perekonomian terkhusus pada usaha-usaha lokal masyarakat sekitarnya. Sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pola pelayanan dan menjaga kelestarian tempat wisata tetap terjaga dengan disertai pengelolaan lokasi wisatawan dengan baik. Selain itu melengkapi fasilitas sekitar tempat pariwisata akan ikut memberikan pengaruh yang signifikan pada pertambahan jumlah wisatawan yang berkunjung, terkhusus pada sektor pariwisata di kepulauan Morotai.

Kondisi fluktuasi tingkat realisasi yang dialami Kabupaten Pulau Morotai tentunya sangat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian Kabupaten Pulau Morotai sehingga diperlukan

berbagai kebijakan pengembangan dan peningkatan kemandirian daerah agar target dan realisasi dapat dipenuhi. Terkhusus pada objek wisata sektor pariwisata di kepulauan Morotai, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai harus lebih jeli melihat potensi sektor pariwisata di kepulauan Morotai menjadi objek wisata yang akan memberikan penambahan jumlah penerimaan PAD dengan melakukan upaya perbaikan dan menjaga kondisi alam sektor pariwisata di kepulauan Morotai tetap lestari dan alami. Selain itu fasilitas yang ada di sektor pariwisata kepulauan Morotai dan sekitarnya tersebut juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan wisatawan yang datang untuk berwisata.

Pengembangan objek wisata di kepulauan Morotai, secara tidak langsung memberikan pula kesempatan kepada UKM kecil menengah ke atas dalam berkarya, menawarkan produk dan jasa ciri khas Kabupaten Kepulauan Morotai. Semakin lengkap fasilitas yang ada pada suatu Daerah wisata maka akan menarik wisatawan untuk datang karena mereka merasa apa yang mereka butuhkan saat melakukan perjalanan wisatanya menjadi lebih nyaman dan tenang. Fasilitas ini bisa berupa jumlah objek wisata yang ada, jumlah kamar hotel yang berada di sekitar tempat wisata yang mereka tuju. Selain itu juga jumlah tempat makan atau Restoran serta Cafe juga menjadi fasilitas pendukung yang sangat dibutuhkan pada Daerah tujuan wisata di sekitar areal sektor pariwisata di kepulauan Morotai. Selain fasilitas, infrastruktur jalan dan transportasi umum juga sangat mempengaruhi tingkat kunjungan wisata yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kabupaten Kepulauan Morotai.

Karena dengan infrastruktur yang baik dan transportasi umum yang mudah, nyaman, dan aman akan membuat wisatawan tidak ragu kalau ingin menuju suatu objek wisata karena infrastruktur jalan dan transportasi umumnya telah layak dilalui dan layak digunakan.

Karena, belum tentu semua wisatawan datang ke sektor pariwisata di kepulauan Morotai dengan menggunakan kendaraan pribadi. Secara otomatis saat melakukan perjalanan untuk menuju objek wisata yang mereka inginkan, mereka membutuhkan transportasi umum. Oleh sebab itu, transportasi sangat penting dalam aktivitas kepariwisataan. Pendapatan asli daerah yang rendah dan diharapkan kontribusi dari sektor pariwisata dapat mendongkrak PAD.

Meskipun tidak ada satu sektor pun yang menjadi kunci ajaib, namun dengan memberdayakan sektor tertentu yang dianggap sebagai ciri khas suatu daerah tersebut tentunya akan memberikan cukup kontribusi kepada pendapatan daerah yang bersangkutan dan tentunya masih memerlukan dukungan dari beberapa sektor terkait. Berdasarkan Penjelasan latar belakang ini, maka judul dalam penelitian ini adalah "Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulau Morotai".

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **Kepulauan Morotai**

Kabupaten Pulau Morotai (695 mil persegi/1.800 km<sup>2</sup>) adalah nama sebuah pulau sekaligus kabupaten definitif baru yang terletak di Kepulauan Maluku, Indonesia. Sebagai bagian dari provinsi Maluku Utara, Pulau Morotai merupakan salah satu pulau paling Utara di Indonesia. Kabupaten Pulau Morotai diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara. Luas wilayah Pulau Morotai 2.337,15 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 74.565 jiwa (2020) dan kepadatan penduduk 31,90 jiwa/km<sup>2</sup>.

Selama abad ke-15 dan 16, Morotai berada di bawah pengaruh Kesultanan Ternate yang berkuasa. Merupakan inti sebuah kawasan besar bernama Moro yang termasuk pulau dan pesisir Halmahera yang dekat dengan Morotai ke selatan.

Pada pertengahan abad ke-16, pulau ini menjadi tempat misi Yesuit Portugis. Kesultanan Muslim Ternate dan Halmahera merasa tersinggung akan pelopor aktivitas penyebaran agama itu dan berusaha mencegah misi itu dari pulau ini pada 1571, sebagai akibatnya Portugis henggang dari kawasan itu. Pada abad ke-17, Ternate menggunakan kekuasaannya atas Morotai dengan memerintahkan berulang-ulang pada penduduknya agar pindah dari pulau itu. Pada awal abad itu para penduduknya pindah ke Dodinga, sebuah kota kecil di titik strategis pesisir barat Halmahera. Lalu pada 1627 dan 1628, Sultan Hamzah dari

Ternate memerintahkan pindahnya penduduk Kristen ke Malayu, Ternate, agar lebih mudah dikendalikan.

Pulau ini menjadi lapangan terbang bagi Jepang selama PD II. Pulau ini diambil alih oleh angkatan Amerika Serikat pada September 1944 dan digunakan sebagai landasan serangan Sekutu ke Filipina pada awal 1945 serta ke Borneo Timur pada Mei dan Juni tahun itu. Merupakan basis untuk serangan ke Jawa pada Oktober 1945 yang ditunda setelah penyerahan diri Jepang pada bulan Agustus.

Adapun Visi dari Kabupaten Pulau Morotai adalah: "Berbasis Kelautan dan Pariwisata, Membangun Morotai Kepulauan Menuju Masyarakat Mandiri, Adil, Sejahtera dan Damai".

### **Konsep Pariwisata**

Kata 'pariwisata' berasal dari bahasa sansekerta, yang terdiri atas dua kata, yaitu 'pari' dan 'wisata'. 'Pari' berarti banyak, berkali-kali dan 'wisata' berarti perjalanan, bepergian. Atas dasar itu, pariwisata diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali, dari suatu tempat ke tempat lain, dalam Bahasa Inggris disebut "tour."

Menurut UU No. 10 Tahun 2009, Tentang kepariwisataan mendefinisikan Pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Menurut Soekadijo (1996) menjelaskan pariwisata secara singkat dapat dirumuskan sebagai kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Pariwisata ialah aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur dan tujuan-tujuan lainnya.

Sedangkan menurut Gamal (2002) pariwisata adalah suatu proses bepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju ke tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan baik karena kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain.

Kepariwisataan adalah fenomena politik-sosial-ekonomi-budaya fisik yang muncul sebagai wujud kebutuhan manusia dan Negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat tuan rumah, sesama wisatawan, pemerintah, dan pengusaha berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan. Segalah sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata ini hendaknya didasarkan pada norma-norma agama, kelestarian sumberdaya alam, budaya, serta memperhatikan kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 10 tahun 2009 bahwa industri pariwisata merupakan kumpulan usaha yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam rangka penyelenggaraan pariwisata, industri pariwisata merupakan salah satu industri yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor lain, karena pariwisata bisa dikalkan sebagai gabungan fenomena dan hubungan timbal balik akibat adanya interaksi dengan wisatawan, supplier bisnis pemerintah, tujuan wisata serta masyarakat daerah tujuan wisata.

Menurut Koen Meyers (2009) Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan lainnya.

Usaha pariwisata dapat dikaitkan dengan sarana pokok kepariwisataan yaitu perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan orang-orang yang melakukan perjalanan wisata.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sesuai dengan hak dan kewajiban daerah yang diberikan oleh UU RI No. 23 Tentang Pemerintah Daerah yang telah memperbolehkan daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak dan retribusi daerah, mendapatkan sumber sumber pendapatan lainnya yang sah, dan mendapat hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang tersebut Pasal 23 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa: Hak dan kewajiban daerah sebagaimana yang dimaksud di atas diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud adalah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 6 UU.RI No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa PAD yaitu:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan
- d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

Manajemen PAD erat kaitannya dengan pengelolaan, menurut Lembaga Administrasi Negara (1985) pengelolaan merupakan proses dari keseluruhan usaha atau kegiatan memikirkan dan menentukan berbagai hal yang bersangkutan dengan apa-apa yang harus dilakukan, mengusahakan, mengatur, menggerakkan, dan memanfaatkan sumber-sumber baik yang berupa manusia maupun bukan manusia diperlukan untuk mencapai tujuan, serta menjamin agar tidak terjadi penyimpangan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan.

Kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan sangat tergantung atas kemampuan untuk mendanai layanan tersebut. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari potensi daerah itu sendiri serta pemanfaatannya. Dengan demikian, selain pajak daerah, maka retribusi merupakan sumber penerimaan daerah yang dapat menyediakan layanan dan barang politik. Selain itu, retribusi merupakan jalan yang berpotensi mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk sektor pendapatan. Secara konsepsional, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah, baik untuk mengumpulkan dana guna keperluan yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunannya.

### **3. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012: 13), yaitu metode penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat positivisme, digunakan dalam meneliti terhadap populasi dan sampel penelitian, tehnik pengambilan populasi dan sample umumnya dilakukan dengan acak atau random sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian yang dipakai, analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif.

Menurut Sugiyono, (2012:119). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu Responden yang ada di Sektor Pariwisata. Menurut sugiono (2012:120), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya keterbatasan waktu dan dana maka dapat menggunakan sampel yang diambil tersebut.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

Potensi pendapatan asli daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Pemerintah daerah harus mampu mengenali dan mengelola potensi daerah yang mereka miliki. Kejelian pemerintah daerah untuk mencari dan mengenali potensi daerahnya akan sangat berpengaruh kepada kapasitas daerah untuk

mencari sumber-sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berhasilnya suatu pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Morotai juga tergantung pada kemampuan para pelaksana yang bertugas pada tempat-tempat daerah tujuan wisata maupun aparat pelaksana pengembangan sektor pariwisata, yakni aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sendiri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam pengujian validitas dan reliabilitas Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan kuesioner/angket yang disebarkan kepada 35 responden dan semua angket yang di sebarakan telah di kembalikan sesuai dengan jumlah Responden yang ada di Sektor Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Morotai, pengujian ini sesuai dengan syarat sebelum pengujian regresi sederhana penelitian ini dapat dilanjutkan jika setiap butir pertanyaan valid dan reliabilitas. Maka dapat dilanjutkan pada pengujian regresi sederhana.

Berdasarkan hasil dari uji variabel *Entered/Removed* menjelaskan tentang variabel Sektor Pariwisata dan Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di masukkan, metode yang digunakan dalam pengujian tersebut yaitu metode *Enter*. Pada hasil Model *Summary* menunjukkan tentang besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0.719a. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0.517 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas Sektor Pariwisata terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 52%.

Hasil uji analisis regresi sederhana *Coefficients* di ketahui nilai *constant* (a) sebesar 9,209 sedangkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) (b) koefisien regresi sebesar 0.818, sehingga persamaan regresi dapat di tulis:  $Y = 9,209 + 0.818X$ , Konstanta sebesar 9,209, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 9,209, Koefisien regresi X sebesar 0.818 menyatakan bahwa setiap pertambahan 1% nilai Sektor Pariwisata, maka nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan bertambah sebesar 0.818. Nilai signifikansi dari tabel *coefficients* di atas di peroleh nilai signifikansi sebesar  $0.001 < 0.005$ , sehingga dapat di simpulkan bahwa arah pengaruh Variabel X terhadap Y adalah positif. Dengan kata lain menolak  $H_a$  dan menerima  $H_o$ : ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persepsi Responden yang ada di Sektor Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Morotai, Berdasarkan nilai t: diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $5.938 > t_{tabel} 2,034$ , sehingga dapat di simpulkan bahwa variabel Sektor Pariwisata (X) berpengaruh terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y). Hal serupa dikemukakan Yeni Ratnawati (2015) dengan judul "Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur."

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persepsi Responden yang ada di Sektor Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Morotai, Hal ini dapat memberikan Implikasi bahwa dengan adanya Sektor Pariwisata, maka akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 5. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan: Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kabupaten Kepulauan Morotai. Hal ini dapat memberikan implikasi bahwa dengan adanya Sektor Pariwisata, maka akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### Saran

Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Morotai dan Dinas Pendapatan Daerah seharusnya memberikan pelatihan kepada para pengelola agar nantinya dapat secara profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di area dan sekitar objek, sehingga umpan baliknya pengunjung

atau wisatawan merasa puas atas pelayanan pengelola yang nantinya memberi kesan daya tarik atas kenyamanan dan keamanan yang diberikan.

Pemerintah daerah harus melindungi alam sekitar objek wisata dan melestarikan kearifan lokal sehingga daya tarik berupa alam yang indah dan atraksi budaya dapat menjadi nilai tambah untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah. 2007. *Pajak dan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Arsyad, Mujib. 2001. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah: Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Burkart, A.J. dan Medlik, S. 1981. *Tourism Past, Present and Future*. London: Heinmann.
- Boediono. 2001. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media.
- Khodayat. 1998. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Meyers, Koen. 2009. *Pengertian Pariwisata*. Jakarta: UNESCO Office.
- Pemerintah Indonesia. 2019. *Undang-Undang No. 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Morotali. 2011. *Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Morotali Tahun 2011-2031*. Morotai: Sekretariat Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. 2011. *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2016*. Tana Toraja: Sekretariat Daerah.
- Rochmat Soemitro. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco.
- Siahalan, Marihot P. 2009. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekadijo, R. 1996. *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata "Systemic Linkage"*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Supriyanto, M. C. N. R. 2022. Overlay Analysis of Potential Economic Sectors of Minahasa Regency in 2017-2021. *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* Vol. 5, No. 2, pp. 489-498.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Times Indonesia. 2020. PAD Pulau Morotai Tahun 2020 Menurun Jauh dari Target. Diakses dari <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/314417/pad-pulau-Morotai-tahun-2020-menurun-jauh-dari-target>
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Keuangan Pusat dan Daerah di Indonesia (Ed. ke-4)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.